



TAHAPAN DAKWAH PEMBERDAYAAN PADA KOMUNITAS MUSLIM: STUDI KASUS PKK PERUMAHAN X SIDOARJO

Rr. Febrina Prima Sari

STID Al-Hadid Surabaya

roro.febrina@gmail.com

Abstrak: Tahapan dakwah pemberdayaan pada komunitas muslim adalah sistematis kegiatan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Bentuknya dengan meningkatkan kapasitas komunitas yang mayoritas muslim di PKK dalam rangka mengendalikan keuangan agar tidak lupa mencatat, salah menghitung, dan menghindari penyalahgunaan. Islam menganjurkan mencatat hutang dengan benar untuk menciptakan keadilan bersama dan ketundukan pada perintah Allah, seperti keuangan PKK perumahan X, pencatatannya kurang tertib dan terbuka. Kajian lain membahas tahapan meningkatkan kapasitas berbentuk penyuluhan, implementasi dan evaluasi. Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif terapan teori tahapan pemberdayaan pada studi kasus empiris. Kajian ini bertujuan menerapkan tahapan peningkatan kapasitas PKK Perumahan X secara sistematis dan tuntas sehingga mampu mengelola keuangan dengan tertib, rutin, dan transparan. Kesimpulannya, PKK perlu menunjuk subyek yang kompeten dan amanah, perlu dengar pendapat para anggota, melakukan dakwah pengendalian keuangan secara tatap muka di moment arisan, pendampingan pencatatan keuangan secara digital, restaffing pengurus, sharing laporan rutin di grup, dan saling menasihati satu sama lain. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu dakwah bahwasanya untuk memajukan komunitas yang mayoritas muslim selain harus sistematis dan tuntas, juga harus diperlukan kemauan bersama menjaga amanah dan langkah-langkah yang tegas namun dengan adab komunikasi dakwah yang etis.

Kata kunci: tahapan pemberdayaan, peningkatan kapasitas, komunitas muslim, pencegahan korupsi, pengendalian keuangan

Abstract: The stages of empowering da'wah in the Muslim community are systematic activities to improve the quality of community life. This takes the form of increasing the capacity of the predominantly Muslim community in the PKK in order to control finances so they don't forget to take notes, make miscalculations and avoid motoring. Islam does not record debts properly to create mutual justice and submission to Allah's commands, such as the finances of PKK Housing X, the recording is less regular and open. Another study discusses the stages of increasing capacity in the form of outreach, implementation and evaluation. This study uses qualitative research methods applied to the theory of stages of empowerment in empirical case studies. This study aims to implement the stages of increasing the capacity of the PKK Housing X systematically and comprehensively so that they are able to manage finances in an orderly, routine and transparent manner. In conclusion, the PKK needs to appoint competent and trustworthy subjects, needs to listen to members' opinions,

preach financial control face-to-face during social gatherings, assist with digital financial recording, reorganize the management, share routine reports in the group, and advise each other. . This research contributes to the development of the science of da'wah, in that to advance the majority Muslim community, apart from being systematic and thorough, it also requires a collective will to maintain the mandate and take firm steps but with ethical propagation of da'wah communication.

Keywords: *capacity-building stages, capacity building, muslim communities, corruption prevention, finances management*

Pendahuluan

Pemberdayaan sebagai bentuk dakwah bil-hal pada organisasi masyarakat bisa meliputi berbagai ruang lingkup, meliputi peningkatan kapasitas masyarakat/komunitas tertentu di bidang ekonomi, hukum, pendidikan, politik, gender, dan lain-lain. Segmentasinya bisa beragam di antaranya masyarakat pedesaan, masyarakat perumahan tertentu, kelompok tani, komunitas muslim, dll. Sumodiningrat dalam Muhammad Alhada Fuadilah Habib, secara konseptual menyampaikan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan sosial dari penduduk sebuah komunitas yang mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif. Tujuannya untuk memecahkan problematika sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang mereka miliki.¹ Pengembangan terhadap kapasitas dapat ditinjau sebagai proses menggerakkan perubahan di berbagai tingkatan untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri dari orang dan organisasi.

Bisa diartikan menyesuaikan dengan dinamika yang ada. Tujuannya untuk merespons lingkungannya yang selalu berubah.² Artinya, tahapan pemberdayaan sangat diperlukan untuk meningkatkan kapasitas lembaga guna mencapai tujuan sosial yang diimpikan. Seperti yang dikutip Charolin, Nabi-pun berproses dalam memberikan contoh dengan dakwah bil-hal dalam bentuk pemberdayaan masyarakat Madinah hingga terjadi perubahan sosial menuju masyarakat madani.³

Ada berbagai komunitas muslim yang masih belum mampu membuat tahapan sistematis dalam mengendalikan keuangan yang tertib dan terbuka. Pimpinan dan para pengurusnya belum mengetahui langkahnya harus dimulai dengan melakukan apa dan bagaimana tahapannya. Bila tidak segera dilakukan tahapan untuk meningkatkan kapasitas mengendalikan keuangan, bisa mengakibatkan kerugian untuk organisasi dan umat. Takmir salah satu masjid di Surabaya terbukti sampai menggelapkan uang infak hingga 266 juta rupiah.⁴ Salah

¹ Muhammad Alhada Fuadilah Habib, 'Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif', *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy* 1, no. 2 (November 2021): 108, <https://doi.org/10.21274>.

² Syifa Dwiastari and Afular Marom, 'Analisis Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan Kota Semarang', *Journal of Public Policy and Management*

Review 6, no. 2 (13 March 2017): 215–25, <https://doi.org/10.14710/jppmr.v6i2.15907>.

³ Charolin Indah Roseta, 'Peran Enabler Agen Dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam Agraris Tradisional: Studi Kasus Desa Karanganyar, Pacitan', *Inteleksia: Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah* 5, no. 02 (Desember 2023): 349–76, <https://doi.org/DOI:10.55372/inteleksia: jpid.v5i2>.

⁴ Achmad Faizal, Farid Assifa, 'Gelapkan Uang Infak Rp 266 Juta, Takmir Masjid Divonis 2,5 Tahun Penjara',

satu takmir masjid di Kabupaten Sampang menelusuri dan mendapati fakta bahwa telah tercatat dalam buku rekening masjid di dua bank di Sampang ada pengambilan uang sejumlah Rp 62.000.000 dari saldo total sebesar Rp. 65.130.401. Tapi saat diminta pertanggungjawaban, tidak ada laporan untuk apa dan ke mana uang tersebut digunakan.⁵ Dari kasus ini terbukti bahwa sejak awal uang masuk, pengurus belum melakukan persiapan pengawasan keuangan. Pada saat berbagai program kegiatan diluncurkan belum ada tahapan deteksi potensi masalah yang akan muncul dan bagaimana bila dalam pengawasan ada masalah, pembahasan perencanaan alternatif solusi, rencana aksi, dan implementasinya. Namun demikian begitu di akhir waktu diketahui saldo banyak berkurang tanpa bisa dipertanggungjawabkan, barulah pengurus melakukan tahap evaluasi, namun ini cukup terlambat.

Organisasi masyarakat PKK Perumahan X di Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu komunitas muslim memiliki masalah pada belum menerapkan tahapan yang sistematis untuk menjaga transparansi pertanggungjawaban sistem pengelolaan keuangan oleh pengurus PKK. Pengurus sering kelupaan mencatat, kesalahan menghitung, melonggarkan orang tertentu boleh tidak mengangsur pinjaman rutin, sehingga menimbulkan potensi penyalahgunaan keuangan (koruptif) dan prasangka di kalangan internal PKK adanya

nepotisme antara beberapa pengurus dan anggota koperasi. Padahal ketika rutin mengangsur uang tersebut bisa dipinjamkan lagi untuk tujuan kesejahteraan ekonomi bersama anggotanya. Artinya pimpinan dan pengurusnya masih belum melaksanakan tahapan pengkajian potensi masalah, menggagas alternatif-alternatif solusi, performalisasi rencana aksi, dan implementasinya, namun langsung melakukan evaluasi di akhir saja.

Dari berbagai realitas tersebut artinya ada berbagai komunitas yang anggotanya muslim maupun mayoritas muslim yang belum melaksanakan tahapan pemberdayaan terhadap pengurus dan anggotanya dalam meningkatkan kapasitas baik pengetahuan maupun kompetensi untuk mengendalikan keuangan organisasinya. Sebagaimana diketahui bahwa lembaga keagamaan atau komunitas muslim diharapkan memiliki tujuan terbentuknya masyarakat (muslim) yang merasakan kesejahteraan baik secara lahiriah berupa kesejahteraan di bidang ekonomi, menurut Erdin maknanya yaitu kemampuan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya sehingga dapat hidup secara layak, mandiri, berkecukupan secara ekonomi dan jauh dari godaan-godaan kemaksiatan dari jalan-jalan kemiskinan.⁶

Kurang sistematisnya tahapan pengendalian keuangan tersebut berdampak pada menurunnya percayanya anggota PKK terhadap pengelolaan kas dan koperasi yang

Kompas.Com, 18 July 2018, <https://regional.kompas.com/read/2018/07/18/18330771/gelapkan-uang-infak-rp-266-juta-takmir-masjid-divonis-25-tahun-penjara>.

⁵ 'Kiai Laporkan Takmir, Pengurus Takmir Laporkan Balik Penggelapan Dana Masjid', *Jatimpos.Co*, 4 July 2024, [https://www.jatimpos.co/hukum/14604-kiai-](https://www.jatimpos.co/hukum/14604-kiai-laporkan-takmir-pengurus-takmir-laporkan-balik-penggelapan-dana-masjid)

[laporkan-takmir-pengurus-takmir-laporkan-balik-penggelapan-dana-masjid](https://www.jatimpos.co/hukum/14604-kiai-laporkan-takmir-pengurus-takmir-laporkan-balik-penggelapan-dana-masjid).

⁶ Erdin Sumardianto, 'Perumusan Strategi Dakwah Masjid Jogokariyan Yogyakarta', *INTELEKSIA-Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah* 3, no. 02 (2022): 243–64, <https://doi.org/10.55372/INTELEKSIAJPID.V3I2.192>.

dirasa kurang transparan dan pencatatan yang berbulan-bulan tidak sinkron, padahal perputaran uangnya tidak kecil. Pada tabungan dan pinjaman koperasi jumlah uang masuk dan pinjaman yang dikelola sebesar antara Rp 3.000.000 sampai Rp 12.000.000 per bulannya. Potensi total tabungan dan bunga di akhir periode menjelang pembagian SHU totalnya kurang lebih Rp 33.000.000 yang terkumpul dari 30 peserta koperasi. Sedangkan untuk jumlah uang kas yang dikelola saldonya Rp 1.800.000 sampai Rp 2.300.000 (data per Maret 2024). Seluruh peserta koperasi adalah anggota PKK, dengan total anggota PKK sebanyak 45 orang. Di samping itu, pengurus PKK terindikasi kurang memahami tanggung jawab transparansi dalam mengelola keuangan organisasi.⁷ Mengingat jumlah kas dan perputaran uang koperasi juga besar (jika ditotal mencapai Rp 15.000.000 sampai Rp 35.000.000), kondisi ini bila dibiarkan nanti bisa memicu isu yang melebar dan menyakitkan misalnya dianggap ada upaya korupsi di sana, padahal itu bisa memecah belah komunitas dan harus segera dicegah.

Jika sebuah komunitas muslim yang menggalang dana dari masyarakat/ umat dan digunakan untuk keperluan program pembangunan masyarakat misalnya dalam PKK Perumahan X ini untuk menjalankan dakwah bil-hal berupa program kesejahteraan, kesehatan, keagamaan, dan penyelamatan lingkungan dari sampah rumah tangga, dalam pengelolaannya tidak transparan, tidak tertib, dicurigai banyak anggotanya, maka bisa mendapat

ketidakpercayaan. Ujung dari ketidakpercayaan itu bisa membuat anggotanya enggan berkontribusi dalam hal keuangan untuk pelaksanaan program-program tersebut, sehingga upaya dakwah bil-hal yang diwujudkan dalam pelaksanaan kegiatan/ program tersebut bisa berpotensi terhambat atau bahkan terhenti. Sebagaimana yang disampaikan oleh Fuad dan Ai Nur menyatakan bahwa pengurus lembaga dakwah perlu menyajikan laporan keuangan, pengendalian internal, pelaksanaan kegiatan penggalangan dana dan pemanfaatan teknologi merupakan optimalisasi takmir masjid untuk menjaga kualitas laporan keuangan. Upaya tersebut digunakan untuk kepentingan masjid maupun lembaga lain, juga mengurangi risiko kesalahan dalam pembuatan laporan, mendukung langkah-langkah pengambilan keputusan, sebagai bentuk tanggung jawab pengurus dalam mengelola dana yang diamanahkan oleh jamaah/ anggota dan menjaga kepercayaan internal pengurus. Usaha mempertanggungjawabkan yang seadil-adilnya terhadap amanah merupakan wujud penghambaan diri kepada Allah SWT.⁸ Agama Islam mengajarkan, ketika umat berurusan dengan uang maupun hutang-piutang hendaknya dituliskan, sebagaimana dalam firman Allah Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 282 menyatakan bahwa: "*Wahai orang-orang yang beriman. Apabila kamu melakukan hutang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskan dengan benar". Janganlah penulis menolak menulisnya sebagaimana Allah telah*

⁷ Wawancara oleh penulis dengan Ibu H, Ibu D, Ibu A, Permasalahan Keuangan di PKK, 20 February 2024.

⁸ Fuad Najmudin, Ai Nur Bayinah, 'Kompetensi Takmir Dalam Menjaga Kualitas Laporan Keuangan Masjid:

Telaah Literatur', *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 10, no. 2 (Oktober 2022): 129–47, <https://doi.org/10.35836/jakis.v10i2.361>.

mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan". Tujuan atau manfaat pencatatan hutang ini adalah untuk menghindari perselisihan, keadilan dan sebagai alat bukti.⁹ Artinya ada himbauan untuk melaksanakan tahapan rencana aksi, tidak hanya ada rencana persiapan saja.

Dakwah dalam rangka pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas pengendalian keuangan di PKK tersebut diperlukan tahapan-tahapan yang sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan. Pemberdayaan yang dilakukan tidak sistematis, tidak menyeluruh, dan tidak berkelanjutan akan mengalami masalah dan berakhir kegagalan. Nella mengungkapkan bahwa faktor penyebab kegagalan program pemberdayaan masyarakat desa, salah satunya adalah tidak adanya penyuluhan serta sosialisasi sebelum program dijalankan.¹⁰

Kajian Azis Muslim mengungkapkan Kegagalan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dalam membangun kemandirian masyarakat miskin karena buruknya kinerja fasilitator. Buruknya kinerja ditandai ketidakpatuhannya dalam menjalankan prosedur yang ditetapkan dalam program, bekerja pragmatis untuk mengejar hasil, dan tidak menjalankan peran, tugas, dan fungsinya secara baik.¹¹ Tidak bisa dipungkiri, prosedur atau tahapan pemberdayaan menjadi sebuah hal yang

penting guna menyukseskan tujuan pemberdayaan. Artinya, setiap pihak yang melakukan pemberdayaan tidak hanya harus mampu membuat tahapan pemberdayaan dengan baik, namun juga harus mampu melaksanakan tahapan pemberdayaan pada masyarakat yang menjadi sasaran dengan baik agar tidak mengalami kegagalan.

Kajian ini bermaksud untuk melahirkan konsep dan panduan penerapan teori tahapan dakwah pemberdayaan jika dikontekskan pada organisasi/komunitas muslim yakni PKK Perumahan X dalam rangka mengendalikan keuangan. Kajian ini bertujuan untuk merumuskan tahapan yang runtut dan sistematis dalam rangka dakwah pemberdayaan pengendalian keuangan pada komunitas muslim yakni PKK Perumahan X di Sidoarjo.

Harapannya kajian ini konsepnya bisa menjadi panduan penerapan tahapan bagi pimpinan dan pengurus PKK Perumahan X di Sidoarjo dalam upaya meningkatkan kapasitas internal untuk mengendalikan keuangan dengan lebih sistematis dan holistik. Hasil verifikasi penerapannya bisa menjadi rekomendasi atau insiprasi bagi komunitas muslim lainnya yang sejenis, dalam pelaksanaan tahapan pemberdayaan guna mengendalikan keuangan di lembaga yang dikelola. Kajian ini juga diharapkan memberi sumbangsih gambaran konkret penerapan teori tahapan pemberdayaan jika dikontekskan ke lembaga sosial keagamaan.

⁹ 'Hutang Dan Pentingnya Dicatat – Al-Rasikh', 29 October 2021, <https://alrasikh.uui.ac.id/2021/10/29/hutang-dan-pentingnya-dicatat/>.

¹⁰ Nella Mirani, 'Faktor Penyebab Kegagalan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Di Desa Ella Hulu Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi Tahun 2016- 2017)' (Yogyakarta, Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 2019),

<https://repository.umi.ac.id/handle/123456789/29707?show=full>.

¹¹ Azis Muslim, 'Analisis Kegagalan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dalam Membangun Kemandirian Masyarakat Miskin (Studi Kasus Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Dan Jawa Timur)', *Jurnal Penyuluhan* 13, no. 01 (March 2017): 79–87.

Lebih lanjut, jika diterapkan dan membuah hasil aktifnya pihak yang diberdayakan bisa memicu mengubah situasi dan kondisi menjadi lebih baik dari sebelumnya.¹²

Dalam kajian-kajian sebelumnya, yang mengulas tentang tahapan pemberdayaan dalam bidang keuangan di komunitas muslim, memiliki tahapan yang berbeda dengan kajian ini, yakni pada kajian Pemberdayaan Muslim Muallaf Melalui *Home Industry* Kerupuk Ikan Lomek di Desa Selat Akar.¹³ Kajian tersebut memiliki sasaran komunitas muslim muallaf, sedangkan kajian ini meneliti komunitas muslim PKK. Kajian tersebut mengulas pemberdayaan ekonomi bisnis, sedangkan dalam kajian ini mengulas pengelolaan kas dan koperasi. Kajian tersebut mengupas tahapan pemberdayaan di antaranya observasi, penyuluhan, pelatihan usaha, dan pembuatan kerupuk. Sedangkan pada kajian ini mengulas tahapan pemberdayaan di antaranya tahap persiapan menentukan aktor pemberdayaan, tahap perencanaan, performalisasi aksi, implementasi, evaluasi, dan terminasi.

Kajian lain mengulas pemberdayaan untuk menanamkan nilai penting dakwah kultural anti korupsi salah satunya menggunakan media seni karawitan¹⁴ dan edukasi anti korupsi pada masyarakat pondok pesantren tertentu.¹⁵ Pada dua kajian tersebut

menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat yang bertemakan transparansi keuangan untuk menghindari korupsi, baru ada di tahap penyuluhan/sosialisasi. Sedangkan kajian ini menunjukkan tahap pemberdayaan meningkatkan kapasitas komunitas muslim dalam hal menciptakan transparansi untuk pencegahan korupsi diperlukan yang sifat tahapannya menyeluruh sampai implementasi dan evaluasinya, serta terminasi. Temuan penelitian pengembangan keilmuan dakwah pemberdayaan untuk mengendalikan keuangan komunitas muslim PKK ini bisa menjadi inspirasi bagi keilmuan pemberdayaan masyarakat jika ingin diterapkan pada berbagai organisasi nirlaba yang orientasinya keagamaan (lembaga dakwah, takmir masjid, remaja masjid, dan sebagainya).

Dakwah dan pemberdayaan adalah sebuah kesatuan. Dakwah adalah usaha atau upaya yang dinamis. Unsur dinamika dalam dakwah diartikan sebagai upaya solusi persoalan-persoalan yang sedang dan akan dihadapi umat. Dengan kata lain dakwah merupakan usaha mengubah masyarakat Islam. Perubahan masyarakat itulah yang disebut pemberdayaan masyarakat. Mengubah masyarakat yang lemah menjadi kuat,

¹² Dedeh Maryani, Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat*, 1st ed. (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019), 8, https://www.google.co.id/books/edition/Pemberdayaan_Masyarakat/67nHDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=buku+pemberdayaan+masyarakat&printsec=frontcover.

¹³ Masduki, Toni Hartono, Vera Sardila, Dony Arung Triantoro, 'Pemberdayaan Muslim Muallaf Melalui *Home Industry* Kerupuk Ikan Lomek Di Desa Selat Akar', *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran*

Dan Dakwah Pembangunan 3, no. 2 (2019): 425–50, <https://doi.org/doi:10.14421/jpm.2019.032-09>.

¹⁴ Suyadi, Waharjani, Sumaryati, Trisna Sukmayadi, 'Da'i Antikorupsi: Pelatihan Dakwah Kultural Pada Paguyuban Mubalig Prenggan, Yogyakarta', *COMMUNITY EMPOWERMENT* 6, no. 7 (2021), <https://doi.org/10.31603/ce.5036>.

¹⁵ Habibul Umam Taquiuddin, Baiq Mulianahs, 'Strategi Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi Pada Santri Di Pondok Pesantren', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2023), <http://dx.doi.org/10.17977/um019v8i1p33-41>.

masyarakat yang ketergantungan menjadi pribadi yang mandiri dan percaya diri.¹⁶

Kajian ini menggunakan teori tahapan pemberdayaan yang ditulis oleh Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan, teori tersebut mengungkap tahapan dakwah pemberdayaan secara detail, sistematis, holistik, dan tuntas mulai dari tahap persiapan, pengkajian/*assessment*, perencanaan alternatif program atau kegiatan, tahap performalisasi rencana aksi, implementasi program dan kegiatan, evaluasi, sampai tahap akhir terminasi.¹⁷ Teori ini menerangkan tahapan yang detail, sistematis, dan menyeluruh mulai dari proses awal persiapan, *assessment*, membuat rencana alternatif program administrasi dan penambahan/pergantian pengurus, performalisasi rencana aksi, pengadaan program dan kegiatannya, hingga kontrol evaluasi dan terminasinya. Teori ini dipandang relevan mengingat kapasitas pengendalian internal komunitas muslim perlu dibimbing secara menyeluruh. Sedangkan teori tahapan pemberdayaan yang lainnya mengungkap tahapan pemberdayaan yang lebih sederhana, yakni meliputi: (1) seleksi lokasi/wilayah, (2) sosialisasi pemberdayaan, (3) proses pemberdayaan masyarakat, dan (4) pemandirian masyarakat.¹⁸ Tahapan ini dipandang kurang sesuai untuk asumsi komunitas muslim sederhana yang kapasitasnya masih minim baik secara pengetahuan maupun kompetensi, sehingga

memang dipandang perlu upaya dakwah pemberdayaan yang bersifat komprehensif.

Metode

Kajian ini merupakan penelitian terapan (*applied research*) sebagai metode penelitian kualitatif yang melibatkan pengamatan langsung dan interaksi dengan subjek penelitian dalam lingkungan alami mereka. Tujuan kajian adalah untuk menemukan solusi dalam menyelesaikan persoalan maupun fenomena yang sedang terjadi.¹⁹ Analisis yang digunakan adalah sintesis induktif atas faktor-faktor dari data deskriptif kondisi riil di PKK Perumahan X yang memiliki keterhubungan logis, kemudian didekati dengan teori tahapan dakwah pemberdayaan yang relevan untuk menghasilkan pemecahan masalah. Kemudian hasil dari penelitian ini disampaikan kepada pihak pengurus PKK untuk diimplementasikan, dilaporkan hasil implementasinya, serta dibuatkan evaluasi atau catatan-catatan tertentu.

Sumber data yang digunakan semuanya adalah sumber data primer. Menurut Umi Narimawati yang dikutip oleh Nuning, "data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama atau yang asli, ditanyakan ke narasumber/ responden, yaitu orang yang dijadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data."²⁰ Data diperoleh dari hasil terjun langsung ke PKK dan dialog

¹⁶ Cucu Nurjamilah, 'Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid Dalam Perspektif Dakwah Nabi Saw', *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2016): 96, <https://doi.org/10.21580/jish.11.1375>.

¹⁷ Dedeh Maryani, Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat*, 13–14.

¹⁸ Yuliana Dewi Rahmawati, Hartuti Purnaweni, Tukiman Taruna, 'Tahapan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Di Desa Cangkring

Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak', *Jurnal Ekosains* 7, no. 4 (March 2016): 89.

¹⁹ Dr Dwi Joko S CIAR S. E., M. I. Pol, CIQnR, CIQaR, Tegor M.M S. E., and Frangky Silitonga M.Si S. Pd, *Metode Penelitian Terapan* (Deepublish, n.d.), 38.

²⁰ Nuning Indah Pratiwi, 'Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi', *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 1, no. 2 (Agustus 2017): 202–24, <https://doi.org/10.38043/jids.v1i2.219>.

wawancara langsung pada Ketua, pengurus, anggota PKK. Instrumen penggalan data menggunakan teknik wawancara mendalam (*depth interview*) sekaligus observasi partisipatif (turut serta dalam kegiatan PKK dan tergabung pada grup *whatsapp* PKK). Sebagaimana dikutip oleh Shofyan, teknik tersebut digunakan untuk memperoleh kualitas data kualitatif yang otentik dalam situasi lingkungan yang natural.²¹ Sesuai kaidah penelitian kualitatif yang interpretatif, data-data primer tersebut diinterpretasikan oleh peneliti.

Hasil dan Pembahasan

1. Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam khasanah metode dakwah, terdapat dakwah *bil hal*, merupakan dakwah menggunakan tindakan nyata atau aktivisme, yang diwujudkan dengan pemberdayaan, amal (charity) dan advokasi kebijakan.²² Dalam dakwah *bil hal*, hubungan antara dai dan *mad'uw* bersifat kemitraan, bukan hubungan ketergantungan, sehingga diharapkan akan tumbuh masyarakat atau komunitas yang dapat berpikir kritis dan mampu mencari solusi masalah dan menjadi berdaya.²³ Untuk itulah perlu dikembangkan model dakwah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ialah proses

pembangunan yang membuat masyarakat memiliki inisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi. Jadi pada intinya kata kunci dari pemberdayaan adalah meliputi: proses pembangunan, masyarakat berinisiatif memperbaiki situasi kondisi diri sendiri.²⁴ Oleh karenanya, pemberdayaan masyarakat idealnya bukan sekedar penyuluhan yang bersifat disampaikan searah semata, namun ditindaklanjuti dengan peran serta masyarakat dampingan untuk bergerak menuju kemandirian organisasi/kelompoknya untuk memperbaiki kondisi mereka menjadi lebih baik.

Menurut Soekanto dalam Sri Ndaru dan Sri Artha, pemberdayaan masyarakat memiliki tujuh tahapan.²⁵ *Tahap pertama* ialah persiapan. Pada tahap ini ada dua langkah yaitu: (a) penyiapan petugas tenaga pemberdaya masyarakat, bisa dilakukan oleh *community worker*; dan (b) penyiapan lapangan pemberdayaan. Penyiapan petugas penting untuk mencapai efektivitas. Penyiapan petugas bertujuan menyamakan persepsi antara anggota tim fasilitator.²⁶ Artinya, diperlukan pemilihan petugas pemberdayaan yang memiliki persepsi sama,

²¹ Shofyan Affandy, 'Formulasi Strategi Dakwah Berbasis Analisis SWOT: Studi Kasus Renstra Masjid Baitussalam Sidoarjo 2023', *Inteleksia - Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah* 05, no. 01 (June 2023): 4, <https://doi.org/10.55372/INTELEKSIAJPID.V5I1.264>.

²² Pajar Hatma Indra Jaya, "Dakwah Pembebasan: Sebuah Cerita Dari Saung Balong, Majalengka, Jawa Barat," *Jurnal Dakwah*, Vol. XIII, No. 2 (2012), 166.

²³ Acep Aripudin, *Pengembangan Metode Dakwah*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2011), 174.

²⁴ Dedeh Maryani, Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat*, 8.

²⁵ Sri Ndaru Arthawati, Sri Artha Rahma Mevlanillah, 'Pengembangan Masyarakat Melalui Penerapan Pengelolaan Kampung KB Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Desa Bale Kencana Kecamatan Mancak', *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 02, no. 10 (March 2023),) <http://bajangjournal.com/index.php/J-ABDI>.

²⁶ Erma Ariyani, Avela Dewi, Hj. Aulia, 'Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Di Wilayah Kelurahan Sungai Andai Kota Banjarmasin', *Jurnal PubBis* 5, no. 01 (2021): 49–59, <https://doi.org/10.35722/pubbis.v5i1.370>.

kapasitas diri memadai dan mampu mengelola keuangan organisasi berdasarkan nilai Islam. Penyiapan lapangan bertujuan untuk studi kelayakan daerah yang akan dijadikan sasaran pemberdayaan.²⁷ Penyiapan lapangan dalam kajian ini yakni organisasi PKK Perumahan X.

Tahap kedua ialah pengkajian “*assessment*”, dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Petugas mengidentifikasi persoalan sesuai kebutuhan dan menakar sumber daya yang dimiliki klien. Tujuannya program tepat sasaran, sesuai kebutuhan dan potensi pada anggota PKK. Tahap pengkajian ini diperlukan untuk efisiensi. Tahap ini menggambarkan bagaimana aktor pemberdayaan mengidentifikasi masalah substansi yang menjadi kebutuhan untuk dipenuhi saat pemberdayaan. Harapannya penyelesaian yang ditawarkan dalam aktivitas dakwah pemberdayaan tidak melebar dan bisa fokus pada tujuan pemberdayaan. Tahap pengkajian ini penting karena sebagai pijakan untuk mendalami inti masalah dan mencari solusinya. Tahap pengkajian ialah proses penyelidikan mendalam untuk menemukan masalah suatu kegiatan.²⁸

Tahap ketiga ialah perencanaan alternatif program. Agen perubahan “*exchange agent*” merancang alternatif *output*-nya berbagai alternatif program bagi klien. Beberapa alternatif mengasumsikan kelebihan dan kekurangannya, sehingga program yang

dipilih efektif dan efisien mencapai tujuan pemberdayaan.

Tahap keempat ialah Performalisasi Rencana Aksi. Aktor perubahan merumuskan dan menentukan program untuk mengatasi masalah. Petugas membantu memformalisasikan gagasan secara tertulis misalnya membuat proposal. Aktor menetapkan siapa saja yang dilibatkan dan bagaimana bentuk rencana aksinya.

Tahap kelima ialah implementasi program. Peran masyarakat sebagai kader diharapkan turut serta menjaga keberlangsungan pengembangan program, sehingga ada keberlangsungan sesuai tujuan yang diidamkan. Kerja sama antar petugas dan masyarakat sangat penting agar tidak melenceng saat di lapangan. Seluruh peserta komunitas muslim memahami dengan jelas maksud, tujuan dan sasarannya, maka program bisa disosialisasikan, sehingga penerapannya bisa lebih lancar. Sosialisasi dakwah pemberdayaan orientasinya meningkatkan pemahaman tentang program. Proses sosialisasi diharapkan meningkatkan ketertarikan anggota dalam berperan aktif dalam pelaksanaan program.²⁹ Artinya, aktor dakwah pemberdayaan perlu melakukan sosialisasi program yang digagas pada pengurus dan anggota PKK ini dilakukan di mana, kapan, dan dengan menggunakan media apa. Sedangkan untuk implementasi bisa mendeskripsikan pendekatan apa yang digunakan, siapa saja yang diperankan, dan berjalan dalam kurun waktu berapa lama.

²⁷ Febriyati dan Suyanto, ‘Pemberdayaan Lansia Melalui Usaha Ekonomi Produktif Oleh Bina Keluarga Lansia (BKL) Mugi Waras Di Kabupaten Sleman’, *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 1, no. 01 (2017): 182, <https://doi.org/10.14421/jpm.2017.011-10> PDF.

²⁸ Sulaeman dan Hastina, ‘Manajemen Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mempertahankan Eksistensi

Sekolah Di SD IT Rabbani’, *ADAARA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 11, no. 01 (February 2021): 6, <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v11i1.2115>.

²⁹ Yuliana Dewi Rahmawati, Hartuti Purnaweni, Tukiman Taruna, ‘Tahapan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak’.

Dapat dijelaskan pula faktor pendukung dan penghambat implementasi program pemberdayaan,³⁰ serta jika ada penghambat bagaimana solusinya.

Tahap keenam ialah evaluasi, dimana proses pengawasan terhadap petugas program pemberdayaan sebaiknya memerankan partisipasi dari warga. Partisipasi tersebut berperan dalam pengawasan internal yang secara jangka panjang diharapkan warga bisa mandiri dalam memanfaatkan sumber daya mereka. Tahap ini diharapkan ada hasil yang terukur keberhasilan pelaksanaan programnya, diidentifikasi kendala-kendala yang terjadi, serta muncul rumusan antisipasinya ke depan, hasilnya disampaikan berupa laporan pertanggungjawaban.³¹ Ini artinya tahap evaluasi harus menerangkan siapa yang mengevaluasi, kepada siapa, dalam bentuk yang bagaimana.

Tahap ketujuh ialah terminasi. Tahap terminasi adalah pemutusan hubungan formal antara aktor dengan komunitas sasaran.³² Proyek harus berhenti karena masyarakat sasaran telah mampu mengubah hidup lebih baik dibanding situasi sebelumnya yang kurang layak.

2. Komunitas Muslim PKK Perumahan X di Sidoarjo

Pengurus PKK Perumahan X hampir semuanya adalah anggota dan pengurus Pengajian di Perumahan tersebut. Mereka

merupakan Ibu-ibu yang juga aktif dalam kegiatan takmir masjid perumahan. Mayoritas tentu beragama Islam. Secara asumsi mereka memiliki ketaatan dalam beragama yang cukup baik. Namun demikian bagaimana nilai Islam dalam berorganisasi khususnya dalam hal mengelola keuangan publik/umat agak kurang dipahami bagaimana implementasinya jika diterapkan dalam mengelola keuangannya. Kegiatan komunitas muslim PKK ini diikuti oleh total 44 orang yang merupakan bagian dari ibu-ibu warga Perumahan X, dengan jumlah pengurus sebanyak 16 orang. Struktur kepengurusan yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Koordinator Arisan, Koordinator Koperasi Tabungan, Koordinator Koperasi bagian Pinjaman, Konsumsi Arisan, Koordinator Minyak Jelantah, Koordinator Senam Pagi, Bendahara Senam Pagi, dan Posyandu. Yang menjadi dasar perlunya dakwah pemberdayaan adalah permasalahan pada keuangan yakni yang di bawah bendahara dan koordinator koperasi. Saat terjadi ketidaksinkronan catatan pada koperasi dan kurang rutusnya laporan keuangan, menimbulkan keresahan, mulai muncul bibit ketidakpercayaan dari banyak anggota koperasi bahkan di kalangan para pengurus juga. Bila ditanya tentang keterbukaannya juga ada yang kurang obyektif menyampaikan posisi keuangan yang sebenarnya.

³⁰ Jadmika Sufiadi, Irwan Noor, dan Suryadi, 'Implementasi Program Pemberdayaan Rumah Tangga Sangat Miskin', *REFORMASI* 5, no. 01 (2015): 160–68, <http://dx.doi.org/10.33366/rfr.v5i1.73>.

³¹ Tiara Rama Dian dan Muhammad Farid Ma'rif, 'Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Padat Karya Tunai (Studi Kasus Desa Plandaan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)', *Publika* 7, no. 4

(2019), <https://doi.org/10.26740/publika.v7n4.p%25p>.

³² Ade Sulistiawati, Syamsuddin RS. and Encep Taufik Rahman, 'Pemberdayaan Keluarga Prasejahtera Melalui Program Keluarga Harapan', *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 7, no. 4 (2022): 402, <https://doi.org/kultashttps://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/in dex.php/tamkin>.

Ada peminjam koperasi yang tidak disiplin pembayarannya, sehingga uang kurang berputar dan menimbulkan kerugian bagi perolehan pengembangan bagi hasil bagi koperasi. Koordinator pengurus memperbolehkan untuk pihak tertentu merapel angsuran. Kebijakan sepihak itu tidak sesuai dengan akad/ kesepakatan awal dan ditutupi informasinya dari ketua PKK. Ada dua peminjam yang belum lunas boleh meminjam kembali. Kemudian muncul desakan dari beberapa anggota PKK yang menuntut keterbukaan laporan bendahara agar tidak hanya di *share* di grup pengurus inti, tapi juga ke seluruh anggota PKK. Salah satu pengurus bagian koperasi secara karakter mudah tersinggung jika diingatkan soal keterbukaan informasi koperasi karena merasa seolah tidak dipercaya dalam mengendalikan keuangan. Sebagian pengurus ada yang merasa jika ditanya keterbukaan informasi malah merasa dituduh melakukan hal yang negatif, padahal keuangan umat memang perlu pertanggungjawaban kepada umat secara terbuka.

Perlu diketahui bahwa semua pengurus PKK bekerja berperan untuk memajukan PKK ini murni sebagai bentuk ibadah dalam bidang sosial sehingga tidak ada yang digaji. Namun demikian, sebagian pengurus ada yang memiliki kesadaran akan pentingnya ketertiban dalam mencatat keuangan, transparansi, dan pertanggungjawaban. Ini menjadi modal untuk menggerakkan pengurus terkait keuangan karena ada dorongan positif dari pengurus yang lain.

Terkait laporan keuangan bendahara sebelumnya kadang-kadang di *share* ke grup

pengurus inti PKK, kadang juga lupa di *share* karena faktor lupa dan sangat jarang diingatkan. Sedangkan pengurus koordinator bidang pinjaman koperasi dalam beberapa bulan terakhir harus masuk kerja dan di beberapa kali momentum arisan yang juga ada kegiatan koperasi beliau sering tidak hadir. Sehingga pencatatan menjadi tidak rutin. Kemudian ada beberapa anggota koperasi yang merasa sudah melunasi hutangnya namun tercatat belum lunas dan ditagih oleh pengurus pengganti lainnya. Kericuhan terjadi saat arisan akibat hal tersebut. Berbulan-bulan hal itu terjadi, pengurus pinjaman diingatkan Ketua tidak juga berubah, tetap tidak ada *update* catatan rutusnya. Selain itu, pada tabungan ada data naik turun pemasukan tabungan padahal tabungan bersifat wajib dan pasti.³³

Kas PKK sumber dananya berasal dari infak anggota, jimpitan donasi sukarela, keuntungan dari penjualan minyak jelantah, serta hibah dari pengurus paguyuban setempat. Paguyuban adalah organisasi setara RT/RW di perumahan X ini. Sedangkan untuk koperasi PKK pinjaman diberikan pada anggota dan pengurus PKK sejauh mereka juga memiliki tabungan. Setiap angsuran pinjaman dan total tabungan wajib akan diputar sebagai pinjaman kembali dan mendapat pengembangan hasil dari yang dipinjamkan agar mendatangkan kesejahteraan bersama. Sehingga jika ada anggota yang menunggak pinjaman maka uang berputarnya juga berkurang, otomatis peluang pengembangan uang juga berkurang. Jumlah kas PKK saat itu di angka dua juta rupiah, sedangkan perputaran bulanan uang koperasi mencapai empat hingga tujuh juta rupiah. Jika ada orang yang

³³ Wakil Ketua PKK, 'Notulensi Hasil Rapat Pengurus PKK' (Sekretaris PKK, Oktober 2023).

menunggak angsuran per bulannya bisa sekitar satu juta rupiah. Nominal tersebut termasuk banyak mengingat jika sampai ada hilangnya potensi tersebut, pengurus tidak ada yang sanggup menggantinya. Utamanya jika masalah tersebut dibiarkan berlarut hingga menjelang akhir periode yakni mendekati idul fitri 2024. Kapasitas kemampuan ekonomi anggotanya mayoritas adalah rata-rata ekonomi menengah yang mengarah pada mapan. Melihat dana kas ditambah dengan juga adanya dana konsumsi pengadaan acara arisan PKK yang cukup besar, artinya PKK memiliki aset finansial yang cukup besar. Dalam sudut pandang dakwah pemberdayaan, sebagaimana menurut Suciati, aset finansial dapat membiayai seluruh proses kegiatan.³⁴ Namun demikian pengurus komunitas muslim PKK ini berniat untuk menyelesaikan sengkabut keuangan tersebut dengan adab yang baik sebagai sesama muslim sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam banyak pengajian yang mereka ikuti. Namun demikian, ada hambatan bagaimana menyampaikannya, mulai dari mana, ada rasa sungkan takur melukai hati pengurus yang bersangkutan, caranya bagaimana agar tetap beradab, khawatir merusak tali silaturahmi sesama muslim. Di titik ini diperlukan pengembangan keilmuan tahapan dakwah pemberdayaan pengendalian keuangan mulai dari persiapan, aktivitas menyadarkan, mendampingi, hingga melepas kemandirian saat sudah berdaya secara mandiri.

³⁴ Suciati, 'Peranan Aset Komunitas Dalam Pemberdayaan Pemuda Oleh Komunitas Kampung Marketer, Karangmoncol, Purbalingga', *Inteleksia* 3, no. 01 (July 2021): 27–52, <https://doi.org/10.55372/INTELEKSIAJPID.V3I1.137>.

3. Pengendalian Keuangan di Internal Komunitas Muslim

Pengendalian internal merupakan bagian dari manajemen risiko lembaga yang konsisten untuk menjamin kesinambungan dan kepercayaan dari masyarakat.³⁵ Dalam kajian ini pengendalian yang dilakukan adalah untuk tujuan mendapatkan kepercayaan seluruh pengurus dan anggota komunitas muslim PKK. Pengendalian internal memiliki tujuan bagi perusahaan/organisasi untuk mengarahkan operasi mereka, melindungi aset, dan mencegah penyalahgunaan.³⁶ Dalam kajian ini berarti tujuan pengendalian internal bertujuan untuk kelangsungan program pembangunan sosial yang dilakukan oleh PKK bisa tetap terselenggara dengan baik, melindungi keuangan PKK, dan mencegah ada pengurus yang menyalahgunakan amanah yang diberikan kepadanya. Unsur-unsur pengendalian keuangan internal meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian, pemantauan, serta informasi dan komunikasi.³⁷

Unsur lingkungan pengendalian mencakup seluruh sikap manajemen dan karyawan perihal nilai penting langkah pengendalian. Wujudnya adalah struktur SDM yang bertanggung jawab dan kebijakan rekrutmen karyawan yang kompeten dan amanah. Dalam hal ini berarti kompetensi atau kesanggupan pengurus, komitmen dengan kesepakatan, dan kejujuran dalam memberikan informasi yang sebenarnya menjadi kunci kriteria pengurus

³⁵ Arison Nainggolan, 'Kajian Konseptual Tentang Evaluasi Pengendalian Internal Perusahaan', *Jurnal Manajemen* 4, no. 2 (2018): 145.

³⁶ Carl S. Waren, James M. Reeve, Philip E. Fess, *Pengantar Akutansi*, 21st ed., Buku 1 (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2005), 235.

³⁷ Carl S. Waren, James M. Reeve, Philip E. Fess, 237.

PKK yang diperlukan. Unsur penilaian risiko membahas bahwa setiap organisasi yang menghadapi risiko, manajernya harus memiliki kemampuan untuk menakar dampak dan mengambil langkah penting. Unsur prosedur pengendalian merupakan jaminan bahwa sasaran bisnis/organisasi akan dicapai, termasuk pencegahan penggelapan. Untuk itu diperlukan upaya untuk memiliki pegawai yang kompeten, perlu perputaran tugas, tanggung jawab yang jelas, pembuktian dan pengamanan keuangan yang jelas serta terpantau rutin. Unsur informasi dan komunikasi bisa bersumber dari internal maupun eksternal organisasi untuk menghindari potensi-potensi kecurangan di organisasi.³⁸ Artinya, diperlukan sebuah upaya untuk mencari menggali informasi dengan berbagai pihak baik di internal maupun eksternal PKK tentang mengapa persoalan keuangan kas dan koperasi PKK ini menjadi tidak transparan, ada ketidaksinkronan pencatatan dan sering tidak dilaporkan.

4. Tahap Pemberdayaan Pengendalian Keuangan PKK

a. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan pemberdayaan dinyatakan bahwa ada dua hal yang harus dikerjakan yaitu penyiapan petugas tenaga pemberdayaan yang akan menyampaikan dakwah pada komunitas masyarakat yang bisa dilakukan oleh *community worker* dan penyiapan lapangan pemberdayaan. Penyiapan petugas bertujuan untuk efektivitas program dengan menyamakan persepsi antara anggota tim fasilitator terkait dengan pendekatan yang akan dipilih.

Persepsi yang sama terkait dengan pengendalian internal di komunitas muslim, aktornya perlu memahami bagaimana nilai agama Islam mengatur tentang pengelolaan dan pencatatan keuangan. Selain itu, persepsi yang sama tentang pengendalian keuangan umat secara umum maupun komunitas tertentu secara khusus. Namun demikian karena persoalan keuangan ini memerlukan kehati-hatian dan komunikasi yang etis sesuai adab dalam Islam, maka persepsinya perlu profesional mengurus pengendalian keuangan, tetapi kemampuan komunikasinya harus yang sesuai adab dalam Islam. Adab komunikasi dalam Islam ialah mengedepankan komunikasi dakwah secara bijaksana, serta berupaya membangun hubungan diri dengan Tuhan, serta sesama demi kedamaian, keselamatan, dan kemaslahatan bersama.³⁹

Oleh karenanya, untuk melihat apakah seseorang itu memahami nilai Islam tentang pencatatan keuangan, maka diperlukan aktor yang memiliki latar belakang keagamaan yang baik. Latar belakang keagamaan yang baik ini bisa dilihat dari berbagai hal, seperti latar pendidikan dari pendidikan agama Islam, sering mengikuti kajian, tergabung dalam organisasi ke-Islam-an, aktif dalam kegiatan takmir masjid, bekerja di lingkungan yang kental akan nilai-nilai keagamaan, dll.

Sejauh mana seseorang memiliki persepsi pengetahuan dan pengalaman tentang pengendalian keuangan dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pekerjaan, dan track record kegiatannya selama ini. Misalnya pernah mendapatkan pendidikan

³⁸ Carl S. Waren, James M. Reeve, Philip E. Fess, 238–42.

³⁹ Mhd Safuan, Kemas Ridho Aufa, 'Adab Komunikasi Dalam Islam: Bijak Dalam Bermedia Sosial', *Hikmah* 16,

no. 2 (Desember 2022): 285, <https://doi.org/10.24952/hik.v16i2.6492>.

ekonomi, pembukuan, maupun akuntansi, pekerjaannya di bagian *finance*, manajer keuangan maupun manajer bidang umum, kegiatannya sering mengurus urusan keuangan organisasi sosial. Dalam komunikasinya di komunitas atau saat berorganisasi mengutamakan pendekatan pengelolaan keuangan secara amanah kepada umat, bukan sekedar pengelolaan sederhana yang berbasis kepercayaan dan kekeluargaan semata.

Dengan menerapkan beberapa instrumen dan kriteria di atas, diharapkan bisa terpilih aktor pemberdayaan pengendalian keuangan yang paham dan mampu membimbing komunitas muslim untuk melaksanakan keterbukaan dan pertanggungjawaban informasi keuangan secara rutin dan tertib. Aktor pemberdayaan yang disiapkan hendaknya menjadi fasilitator yang memiliki ketegasan, namun tetap etis dalam memberikan dakwah penyuluhan pengendalian internal, namun tetap memiliki dasar perintah Allah maupun hadits Nabi. Sedangkan penyampaiannya diharapkan secara etis dan bijaksana, sehingga tidak terkesan memberi perintah, melainkan bisa menjadi contoh yang baik, mampu menggerakkan komunitas muslim berdasarkan kesadaran pribadi dan motivasi penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari sehingga secara tidak langsung merasa menjadi lahan ibadah. Hal tersebut diperlukan karena mengingat pengendalian keuangan penting pada komunitas, tapi cukup riskan. Namun tetap diperlukan paparan informasi yang relatif ringkas agar mudah dimengerti.⁴⁰

Mengingat semua pengurus ini bergerak di PKK secara sukarela, tidak digaji, dan ada pengurus terkait keuangan yang mudah tersinggung, maka pendekatan-pendekatan yang digunakan haruslah yang etis dan disampaikan sebisa mungkin oleh orang yang netral. Di PKK ini terdapat pengurus yang memiliki kesadaran dan tuntutan keterbukaan informasi keuangan namun kesulitan mengutarakan secara terbuka tapi yang tidak menyinggung. Ketua PKK adalah seorang yang berprofesi sebagai manajer bagian di perusahaan swasta dan wakilnya adalah seorang Dosen bidang pengendalian keuangan (anti korupsi) dan etika komunikasi dakwah. Ketua PKK dipandang berdasarkan profesi dan pengalamannya memimpin PKK sejak lebih dari 10 tahun yang lalu, terbukti mampu menggerakkan dan berkomunikasi secara etis pada setiap orang. Sebelumnya, ketua PKK juga menjadi ketua PKK di wilayah lain tempat tinggalnya sebelumnya. Ketua PKK juga aktif dalam kajian di perumahan X dan menjadi anggota takmir masjid di perumahan tersebut. Kiprahnya dalam berbagai aktivitas sosial dan keagamaan tidak lagi diragukan, terlebih peran serta dalam keorganisasian keagamaan juga sangat aktif. Beliau juga rutin mengikuti kajian istighosah dan yasin tahlil yang mana jemaah juga mendapatkan berbagai materi dakwah. Wakilnya dikenal sebagai orang yang tegas dalam memegang komitmen bersama dan tidak segan mengingatkan jika ada kegiatan atau program atau gagasan yang tidak sesuai tujuan dan kesepakatan PKK. Untuk itu lebih tepat jika persiapan penyuluhan dilakukan oleh Ketua dan Wakil Ketua PKK yang dipandang memiliki kompetensi, moral, dan wawasan keilmuan

⁴⁰ Untung Rahardja, Qurotul Aini, Nur Azizah, dan Nuke Puji Lestari Santoso, 'Efektivitas Akuntansi Online Dalam Menunjang Proses Rekonsiliasi', *NJCA*

(*Nusantara Journal Of Computers And Its Application*) 3, no. 2 (Desember 2018): 106, <http://dx.doi.org/10.36564/njca.v3i2.69>.

terkait pengendalian keuangan dan membina pengurus serta anggota PKK selainnya.

Pada tahap persiapan ini diperlukan penyiapan lapangan guna pelaksanaan dakwah pemberdayaan terhadap pengurus dan anggota PKK. Penyiapan lapangan ini adalah rencana tempat dan perkiraan waktu/ momentum yang tepat. Mengingat Ibu-ibu PKK ada yang bekerja di kantor dan ada yang ibu rumah tangga maka diperlukan dialog tentang kendala kesibukan dan membahas solusinya apa. Namun bagi pengurus yang memang tidak ada waktu, kesulitan menjalankan perannya sebagai pengurus hendaknya mengajukan jadwal yang lain yang memungkinkan.

Penyiapan lapangan tujuannya untuk studi daerah tersebut layak sebagai sasaran. Penyiapan lapangan berarti bagaimana aktor pemberdayaan yakni Ketua PKK dan Wakilnya memastikan layak dilakukan pemberdayaan terhadap masalah di PKK Perumahan X ini. Terkait dengan lingkungan tempat pelaksanaan dakwah penyuluhan pemberdayaan dapat diusulkan di rumah salah satu pengurus maupun anggota PKK. Momentumnya jika disatukan sasaran dakwah penyuluhannya bisa saat arisan berlangsung. Jika sasarannya dipecah untuk pengurus sendiri bisa di rumah salah satu pengurus, sedangkan untuk sasaran anggota PKK bisa di rumah salah satu anggota yang ketempatan arisan.

Kriteria tempat secara spesifik secara luasan untuk rapat sekitar 15-30an orang, kondisi tidak terlalu ramai, dan mudah dijangkau tidak jauh dari rumah pengurus agar memudahkan dan menggugah antusiasme (mengurangi absen karena jauh). Ditinjau

dari potensinya, rata-rata rumah pengurus banyak yang luas (sekitar 90-120m²), beberapa ada yang banyak anaknya dan beberapa ada yang belum memiliki putra/putri, ada yang di rumahnya banyak perabot dan ada yang minim perabot. Di lingkungan sekitar, perumahan X ini belum ada balai RT/RW dan ada fasilitas umum namun tidak beratap dan banyak nyamuk. Sehingga secara tempat bisa ditentukan di rumah pengurus PKK saja, yang sekiranya masih ada ruang tamu yang cukup longgar bisa untuk 15 orang dan kondisinya tidak banyak anak yang sedang belajar.

Selain tahap persiapan ini melibatkan pengurus, sebaiknya juga melibatkan seluruh anggota PKK. Bisa jadi penyuluhan pemberdayaan yang dilakukan tidak hanya berupa dakwah bil-lisan seperti penyuluhan langsung, namun juga dakwah bil-hal mencontohkan dengan bimbingan langsung yang memerlukan fleksibilitas metode dan tempat yang tidak harus bertemu secara tatap muka langsung. Maka pendampingan secara fleksible tempatnya bisa memanfaatkan lapangan virtual seperti pada aplikasi pesan *whatsapp* pengurus maupun anggota PKK. Sehingga pelaksanaan dengar pendapat anggota koperasi bisa melalui pesan singkat baik lewat saluran pribadi maupun grup pengurus PKK dan koordinator blok di perumahan X tersebut.

Hasilnya, dalam masa persiapan ini Ketua dan wakil ketua PKK telah sepakat untuk mengadakan upaya tahapan pemberdayaan pengendalian keuangan sebab jika dibiarkan bisa memunculkan kerugian keuangan dan menurunkan kepercayaan anggota PKK. Untuk itu dibuat kesepakatan untuk merapatkan dulu dengan para pengurus PKK yang selainnya.

b. Tahap Pengkajian Masalah

Pada tahap pengkajian, aktor pemberdayaan mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan dan juga sumber daya yang dimiliki klien (komunitas muslim PKK Perumahan X) agar tidak salah sasaran serta pemberdayaan berjalan efisien. Harapannya penyelesaian yang ditawarkan dalam aktivitas dakwah pemberdayaan bisa fokus pada tujuan akhir pemberdayaan yang ditetapkan. Petugas/aktor dakwah pemberdayaan menggali permasalahan ketidakterbukaan informasi dan belum ada pertanggungjawaban yang rutin keuangan kas dan koperasi. Pendataan tersebut sumbernya harus dipastikan relevan dan obyektif, maka sumber bisa diambil dari informasi keluhan para pengurus dan anggota komunitas muslim PKK. Antar pengurus dan anggota bisa digali diwawancara satu per satu maupun per kelompok untuk dicocokkan kebenarannya. Kemudian informasi tersebut bisa di-*double check* kebenarannya melalui data-data pendukung bisa berupa buku-buku tabungan yang ada di pengurus yang bersangkutan, catatan di buku induk pengurus, dan dari postingan di grup tentang saldo kas yang memang belum rutin di *share* ke grup PKK.

Setelah itu dikonfirmasi ulang pada pengurus tentang apa persoalan dan kendalanya. Dalam mempertanyakan kendala, secara etis dalam Islam hendaknya juga dengan bahasa yang baik, tidak menyudutkan, menuduh, merendahkan harga dirinya. Melainkan lebih ke berdialog tentang keterbatasan kapasitas diri yang mereka miliki sehingga melahirkan persoalan ketidakmampuan menjalankan pengendalian keuangan yang baik. Dapat

disampaikan di awal bahwa kita tetap saudara sesama muslim, di mana jika muslim yang satu kesulitan, sebagai sesama muslim harus saling tolong menolong. Sebagaimana hadits yang dikutip oleh Rozali, prinsipnya Allah akan membantu kesulitan hambanya yang berkenan membantu kesulitan saudara sesama muslim lainnya. (HR. Bukhari No. 2442).⁴¹

Dari pengkajian masalah itu bisa dimungkinkan muncul persoalan mungkin karena waktu dan kesibukan, mungkin karena peralatan gadget dan teknologi yang belum dimiliki, mungkin juga karena *mindset* pengurus yang merasa belum menangkap pentingnya pencatatan yang tertib dan ada pertanggungjawaban ke umat, bisa juga sering lupa, maupun alasan lain yang mungkin justru belum terprediksikan sebelumnya.

Dilihat dari realitas tersebut, tahapan pengkajian sebelum dakwah penyuluhan dilakukan, ada yang dilakukan berkelompok saat *hearing* keluhan anggota PKK dan dalam rapat pengurus, ada pula yang dilakukan secara individual bertanya pihak yang terkait. Pendekatan pengkajian berkelompok tersebut dilakukan untuk efisiensi waktu karena dilakukan saat momentum arisan bisa bertemu dengan banyak anggota, bukan memilih media bertemu personal ke semua anggota satu per satu, mengingat jumlah anggota hampir 50 orang. Pendekatan pengkajian dengan berkelompok dilakukan saat rapat pengurus juga agar lebih efisien secara waktu. Selain itu pengurus lain jadi terlibat secara aktif dalam mengkaji

⁴¹ Dr. M. Rozali, Lc. MA, 'Tolong Menolong Demi Kebaikan Dan Kesejahteraan Masyarakat', *Buletin Taqwa Universitas Medan Area*, Oktober 2019, Oktober 2019 edition,

<https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/12514/1/M%20Rozali%20-%20Tolong%20Menolong%20Demi%20Kebaikan%20dan%20Kesejahteraan%20Masyarakat.pdf>

substansi masalah di keuangan PKK. Sehingga aktor pemberdayaan bisa fokus terhadap masalah inti yang terjadi dan terhindar dari melebarnya masalah kemana-mana. Hal-hal yang kiranya sangat sensitif dan berpotensi memojokkan pihak tertentu bisa dipecahkan dengan komunikasi yang bijaksana dengan dibicarakan secara terbatas beberapa orang saja misal 2-4 orang maupun pendekatan personal. Islam sendiri mengajarkan umatnya agar menjaga aib orang lain.⁴²

Tahapan ini kemudian diterima dan diinisiasi oleh Ketua PKK dengan membuat undangan mengumpulkan seluruh pengurus PKK untuk membahas bersama fenomena masalah keuangan yang terjadi, dan hasilnya semua menyepakati bahwa pengelolaan keuangan memang sedang ada persoalan dan perlu mencari solusi untuk perbaikannya ke depan. Pengurus menyadari bahwa memang perlu adanya upaya menyadari bahwa longgarnya ketentuan pinjaman dan pencatatan yang tidak rutin dan rapi bisa menjadi masalah di kemudian hari. sehingga banyak komplain dari anggota arisan serta koperasi. Jika dibiarkan maka bisa memicu ketidakpercayaan pada pengurus, padahal sebetulnya hanya masalah ketertiban dan kurang komitmen serta tidak ada pengurus yang melakukan penyelewengan.

c. Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan PKK Perumahan X di Sidoarjo

Pada tahapan ini, "*exchange agent*" secara partisipatif perencanaan alternatif *output*-nya berupa beberapa alternatif program dan kegiatan yang dilakukan guna menyadarkan seluruh elemen di PKK untuk menyadari nilai

penting pengendalian internal. Beberapa alternatif harus dapat menggambarkan kelebihan dan kekurangannya, sehingga alternatif program yang dipilih efektif dan efisien terasa dampaknya dalam pengendalian keuangan internal.

Pada tahapan ini *agent of exchange* perlu menggali partisipasi dengan melibatkan anggota dan seluruh pengurus PKK, memberi masukan cara mengatasi masalah. Bisa jadi tidak semua warga paham bagaimana menyelesaikan persoalan. Untuk menggali usulan alternatif solusi dari warga hendaknya diarahkan agar sesuai substansi masalah. Berikan contoh yang konkret bagi ibu-ibu sesuai kapasitas mereka. Bila belum ada yang sanggup memberi masukan solusi, aktor bisa menunjukkan hasil pemikirannya sendiri.

Jikapun belum mencapai titik kesepakatan solusi yang terbaik, dapat menunjuk seorang yang ahli dalam keagamaan dan keuangan untuk memberikan dakwah dengan materi terkait yang khusus untuk memberikan pencerahan atas masalah pengendalian keuangan kas dan koperasi. Bisa juga mengundang pihak eksternal yang memiliki pengalaman dan kompetensi dalam bidang pengendalian keuangan kas dan koperasi organisasi sosial.

Dari banyak masukan alternatif solusi, aktor mengembangkan solusi-solusi lain dan mempertimbangkan yang terbaik. Sebab dari masalah belum terciptanya pengendalian internal pelaporan keuangan yang terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan di antaranya bisa berupa persoalan pemahaman, bisa juga soal kesulitan implementasinya. Sehingga

⁴² Rakimin Al-Jawiy, 'Khutbah Jumat: Keutamaan Menutupi Aib Orang Lain', kolomnis (nupline, 25 February 2022),

<https://www.nu.or.id/khutbah/khutbah-jumat-keutamaan-menutupi-aib-orang-lain-aXJKx>.

bisa muncul dua alternatif. Alternatif pertama yakni menyelenggarakan dakwah dalam bentuk pengajian isinya tentang menjaga amanah dengan memahami hak dan kewajiban mengelola keuangan dipercayakan padanya. Selain itu, penyuluhan juga berorientasi merangsang partisipasi anggota agar jika ada masalah dari pengurus, anggota juga ikut mengontrol kinerja pengurus. Bentuknya seperti pendampingan yang memberikan contoh penerapannya. Setiap penyuluhan, dicek pemahaman akhir pasca acara dakwah pengendalian internal dari dialog dan peranan pengurus terkait apakah sudah ada perubahan atau belum. Jika belum ada perubahan bisa jadi pengajian tentang pengendalian keuangan perlu dilakukan secara berkelanjutan atau diadakan beberapa kali agar lebih dipahami secara mendalam. Juga diberikan contoh-contoh studi kasus riil pada komunitas muslim lainnya. Dakwah pengarahan dan penambahan wawasan ini bisa disampaikan dalam bentuk penyuluhan saat acara PKK maupun menitipkan pesan tentang menjaga amanah umat pada acara pengajian yang ibu-ibu ikuti. Namun tidak perlu disebut penerapannya di kelompok atau komunitas yang mana untuk menjaga kebaikan bersama.

Selain menggelar penyuluhan yang berkelanjutan, aktor pemberdayaan juga membuka rencana kemungkinan langkah strategis seperti studi banding pengelolaan dan pengendalian keuangan ke komunitas lainnya yang bisa dijangkau. Pengurus yang memiliki pemahaman yang benar dan baik pengendalian keuangan sesuai petunjuk Islam bisa diperankan juga untuk berbagi pengalaman dan mendampingi pengurus yang masih kesulitan menerapkannya.

Pengurus-pengurus yang dirasa masih sulit disamakan persepsinya terhadap menjaga dan mengendalikan harta umat perlu bimbingan lebih, jika mampu bisa dibimbing secara personal. Namun jika tidak mampu, dan ada pengurus lain yang bisa lebih amanah, bisa didukung atau disarankan pergantian pengurus di beberapa divisi.

Alternatif-alternatif kegiatan dakwah pemberdayaan tersebut perlu didetailkan rencana aksinya. Bagaimana format acaranya, siapa dai/pembicaranya, *fee*-nya berapa, gaya membawakan penyuluhannya, tempat acaranya dimana, momentum/jadwal penyampaianya kapan. Mungkin juga perlu dipertimbangkan berapa durasi waktunya, apakah diperlukan penyediaan peralatan atau aplikasi tertentu, apakah ada pengurus yang memiliki, jika tidak punya solusinya bagaimana, dan sebagainya, akan dibahas pada tahapan formalisasi rencana aksi.

Alternatif program yang dipilih adalah dengan mengadakan penyuluhan yang dilakukan oleh wakil ketua PKK dan rekannya yang dikenal dan diperkenalkan sebagai sosok yang profesional dan sejauh ini amanah dalam tanggung jawab keuangan. Momentum pembangunan kesadaran tersebut dilakukan pada saat pelaksanaan arisan PKK, di rumah salah satu anggota PKK yang sudah dikondisikan murni untuk acara ini. Pelaksanaannya tidak mengganggu kegiatan reguler arisan dan koperasi karena secara waktu dimajukan sehingga ada cukup waktu yang memadai. Format acaranya disusun seperti penyuluhan singkat dengan bahasa yang sederhana, serta mengandung ajakan kepada seluruh pimpinan, pengurus, dan anggota PKK untuk berkomitmen dalam menyelenggarakan pengendalian keuangan dan bersama-sama mengawasi berjalannya

transaksi keuangan. Hasilnya mendapatkan sambutan positif dan antusiasme yang tinggi dari seluruh anggota PKK. Ada keinginan yang kuat untuk semuanya terlibat untuk memperbaiki pengendalian keuangan/kas PKK.

d. Tahap Formalisasi Rencana Aksi

Pada tahapan ini aktor pemberdayaan membantu komunitas muslim PKK merancang dan memilih program untuk mengatasi persoalan di PKK. Petugas berpartisipasi memformalisasikan gagasan secara tertulis misalnya membuat proposal bagi donatur. Secara prinsip perlu menetapkan siapa yang dilibatkan dan bentuk konkret dan langkah aksinya.

Setelah menampung dan *me-list* berbagai gagasan alternatif program/kegiatan, perlu membantu mempertimbangkan manfaat dan mudharatnya dari berbagai alternatif. Apakah hasilnya memilih salah satu, beberapa, maupun melaksanakan semua alternatif bisa dibahas dan diputuskan bersama dalam musyawarah mufakat. memutuskan untuk menentukan perlu aksi apa saja yang dianggap relevan untuk menyelesaikan masalah.

Alternatif *pertama*, mengadakan dakwah penyuluhan penyadaran nilai penting kaidah etis bagi pengurus dan anggota koperasi simpan pinjam PKK. Di mana penyuluhan tersebut hendaknya dikemas dengan diksi dan kalimat yang halus dan tidak menyinggung siapapun. Jika acaranya cukup lama hendaknya ditambahkan penyediaan dana konsumsi. Untuk menghemat waktu dan acara, bisa dilaksanakan saat arisan berlangsung, sehingga dana konsumsi tidak perlu tambahan khusus. Disarankan cukup gabung dengan dana konsumsi arisan PKK.

Pengadaannya sekaligus di rumah anggota yang kedapatan ketempatan rumahnya dijadikan tempat pemberdayaan. Aktor pemberdayaan juga bisa mengambil peran sebagai dai/penyampai materi dakwah pemberdayaan. Penyampai materi bisa berasal dari internal komunitas jika ada yang secara kemampuan dan komunikasi dakwahnya mumpuni, namun juga bisa mengambil dari pihak eksternal yang kompeten. Terkait dengan *fee*, jika pengisinya dari internal dan sama-sama memiliki motivasi ibadah bidang sosial, biasanya tidak berbayar. Namun jika khawatir ada masalah di kemudian hari, bisa dibicarakan di awal. Untuk Dai pembicara dari eksternal komunitas muslim PKK, bisa ditanyakan dulu secara profesional dan santun tentang berapa besaran *fee*-nya, jika mampu silakan disepakati nominal dan cara pembayarannya. Karena secara ekonomi para anggota komunitas muslim PKK ini rata-rata menengah yang cenderung mapan, dan sangat antusias jika dalam sebuah acara terdapat *doorprize*, maka bisa dibuka pengadaan *doorprize* dari siapapun yang ingin berinfak untuk menambah semangat peserta dakwah pemberdayaan. Yang mendapat *doorprize* disarankan ialah yang dapat menjawab pertanyaan seputar pemahaman materi dakwah tersebut.

Dakwah pemberdayaan tidak hanya menasar pengurus tapi juga anggota. Sehingga diperlukan juga sosialisasi penegasan ketentuan peminjam koperasi tidak boleh lagi menunggak angsuran meskipun dirapel. Sanksinya bila melanggar akad kesepakatan pinjaman dan angsuran hendaknya ditentukan atas asas keadilan dan tidak kontraproduktif dengan tujuan kesejahteraan umat.

Kedua, untuk mengganti pengurus yang kurang dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan keterbukaan informasi dan ketertiban administrasi untuk pengendalian keuangan komunitas muslim PKK ini, maka harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak ada yang merasa tertuduh atau tersinggung. Caranya bisa memanfaatkan pengurus yang mengundurkan diri sebagai peluang/momentum untuk menambah/memasukkan pengurus baru yang *track record* dan kompetensinya menunjang amanah keterbukaan laporan keuangan. Pengurus baru ini dijadikan pengurus utamanya, sedangkan yang lain adalah pendamping. Sedangkan pengurus yang mampu menyesuaikan diri dan berbenah diri dan bisa meluangkan waktu sehingga dapat menjalankan pengendalian keuangan dengan amanah bisa diteguhkan tetap sebagai pengurus dan senantiasa diingatkan dihimbau secara rutin untuk melaporkan keuangan yang menjadi tanggungjawabnya dengan bahasa yang santun dan menjaga adab komunikasi dalam rangka menasihati.

Ketiga, digitalisasi laporan keuangan utamanya yang koperasi sistemnya ini lebih rumit. Namun mengingat ada di antara pengurus yang di kantor terbiasa membuat laporan keuangan dan mengerti program atau program *microsoft excel*, maka bisa diperankan untuk membuat contoh rekap laporan simpan pinjam koperasi. Agar ke depan siapapun yang menjadi pengurus keuangan baik kas maupun koperasi dapat melaksanakannya, maka proses pencatatan dan hasil pembagian SHUnya didemokan dianjurkan diajarkan kepada semua pengurus pada rapat pengurus. Dari situ, keterbukaan informasi sekaligus bisa diterapkan dan *dimonitoring/dievaluasi* jika misalnya ada kekeliruan catat.

Rencana aksi tersebut disampaikan oleh Ketua PKK dan dimintakan persetujuan dari semua pengurus dan telah disetujui, semua opsi tersebut tanpa dipilah mana yang dilakukan mana yang tidak. Sebab dengan pertimbangan solusinya harus menyeluruh dan berupaya agar diterapkan tidak hanya saat ini tapi juga untuk jangka panjang ke depan secara berkelanjutan.

e. Tahap Implementasi Program dan Kegiatan

Tahap ini membutuhkan peran masyarakat sasaran untuk menjaga keberlangsungan program yang tengah dikembangkan memiliki keberlanjutan jangka panjang. Untuk itu, program tersebut perlu disosialisasikan secara massif. Artinya, dalam hal kajian ini perlu diungkap oleh Ketua dan Wakil PKK sebagai aktor melakukan dakwah yang isinya sosialisasi program yang digagas pada pengurus dan anggota komunitas muslim PKK ini dilakukan di mana, kapan, dan dengan menggunakan media apa, adakah kendala, dan bagaimana solusinya. Perbedaan tahap ini dengan tahap rencana aksi adalah pada tahap ini sudah tinggal melaksanakan acara sesuai rencana dan mengatasi hambatan teknisnya saja.

Pertama, dari kegiatan dakwah penyuluhan dipastikan Dai penyampai materi datang tepat waktu, materi dakwah tepat sesuai yang direncanakan, tidak melebar atau keluar dari pokok masalah hak dan kewajiban menanggung amanah serta komitmen untuk mengikuti akad kesepakatan bersama hasil musyawarah di komunitas muslim di PKK. Untuk hal-hal lain seperti pertanyaan untuk peserta kajian yang mendapatkan *doorprize* dipastikan berhubungan dengan materi, sedangkan konsumsi dan *doorprize* sebagai penunjang acara dipastikan tersedia dengan cukup.

Kedua, untuk mengomunikasikan siapa pengurus yang perlu diganti, dibicarakan dengan bahasa perlunya penambahan pengurus utamanya bagi pengurus yang memang kesulitan menyanggupi tuntutan umat dalam keterbukaan informasi, kami menghargai kesibukan dan pekerjaan masing-masing, sehingga nampaknya memang perlu pengurus baru yang kiranya secara waktu bisa sanggup menjalankan peran tersebut. kalimat tersebut diharapkan tidak menyudutkan siapapun pengurus lama yang dianggap sulit menjalankan amanah pengendalian keuangan.

Ketiga, adalah implementasi digitalisasi harus dipastikan laptop/komputer/HP-nya ada, siapa yang ditunjuk dipastikan bisa membuat contoh dan format laporannya. Kemudian ditentukan kapan bisa disosialisasikan secara terbuka rincian dan totalnya, sehingga bisa diumumkan secara terbuka bahwa kas dan koperasi PKK sekarang sudah bertransformasi secara menyeluruh menjadi komunitas muslim yang lebih bisa amanah mengelola keuangan umat dan meningkatkan kesejahteraan bersama.

Pelaksanaan tahap implementasi ini dalam hal mengganti pengurus, tantangannya adalah mencari pengurus yang bersedia memegang koperasi, mengingat ini kerja sukarela dan tanpa gaji sama sekali. Namun setelah ditawarkan ke anggota PKK, ada yang berkenan untuk menghandle-nya dan yang ditunjuk sejauh ini punya reputasi kejujuran dan menjalankan amanah dengan baik. Untuk digitalisasi laporan keuangan disajikan menyesuaikan keadaan dan kapasitas para pengurus. Penyajiannya dalam bentuk laporan deskripsi sederhana memuat informasi saldo sebelumnya, pemasukan,

pengeluaran, dan saldo akhir. Dilaporkan di grup aplikasi whatsapp pengurus dan anggota PKK setiap bulan, sehingga semua pihak yang terkait bisa turut mengawasi.

f. Tahap Evaluasi

Tahap menjalankan pengawasan oleh masyarakat dan aktor agar dalam jangka waktu pendek mencapai kesadaran pengawasan di internal komunitas. Jangka panjangnya dapat membangun komunikasi masyarakat mandiri sesuai sumberdaya.

Pada bulan-bulan berikutnya, kas dan koperasi komunitas muslim PKK memiliki dinamika pemasukan, penyimpanan, dan pengeluaran setiap bulannya. Keterbukaan *sharing* informasi *update* perkembangan dinamika keuangan tersebut harus dipantau dan dievaluasi secara berkala dengan bahasa yang beradab dan santun. Apakah pengurus sudah mengunggah laporan keuangan atau belum. Jika lupa dan sudah ada yang mengingatkan satu sama lain, maka itu berarti mereka dinyatakan telah mampu berdaya mengendalikan keuangan kas dan koperasi komunitas muslim PKK. Dengan demikian akan pengurus yang bersangkutan segera mengunggahnya di grup komunitas. Jika ada salah ketik dari pengurus, diharapkan mulai ada anggota koperasi yang menanyakan apakah itu salah ketik atau ada penjelasan lain. Jika itu berjalan terus secara rutin dan terbuka, hingga masuk periode demi periode berjalan lancar angsurannya, pembagian SHU juga lancar, dan kas dilaporkan rutin, maka ini indikasi yang sangat positif.

Jika ada kendala, harapannya dijelaskan secara terukur capaian keberhasilan yang dicapai, serta diidentifikasi kendala-kendalanya untuk diantisipasi pada periode

berikutnya. Kendala yang dialami bisa jadi karena para pengurus ini kebanyakan adalah ibu bekerja, dan adapun yang tidak bekerja atau ibu rumah tangga memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengurus rumah dan kebutuhan suami serta anak-anak. Maka kadang-kadang mengunggah laporannya agak terlambat di akhir bulan, bukan langsung sesaat setelah arisan. Namun demikian itu masih lebih baik daripada tidak ada laporan bulanan. Hal-hal yang menyangkut masalah yang tidak substansial, bisa ditoleransi mengingat komunitas muslim PKK ini kegiatannya wujud dari ibadah sosial memuat unsur profesional nirlaba, bukan profesional murni yang digaji. Dari pelaksanaannya sekitar bulan Januari 2024 hingga Desember 2024, semua rangkaian mulai tahap persiapan, dan lain-lain sehingga memunculkan rencana aksi dan implementasinya berjalan cukup baik dan membuahkan hasil laporan keuangan yang tercatat rapi, kesesuaian koperasi sesuai perjanjian, dan pemantauan/pengawasan laporan keuangan sudah bisa terbuka dan disajikan rutin meskipun dengan format laporan yang sederhana dan tidak memakan banyak waktu. Sehingga laporan tersebut-pun bisa dibaca dengan mudah. Integritas pengurus PKK juga kian meningkat seiring dengan berjalannya langkah-langkah tersebut.

g. Tahap Terminasi

Tahapan ini merupakan batas pemutusan hubungan formal antara agen dengan komunitas sasaran dan proyek berakhir. Artinya komunitas muslim PKK yang diberdayakan telah mampu mengoptimalkan kapasitas komunitasnya untuk bisa mengendalikan keuangan kas dan koperasinya lebih baik dengan mengubah situasi kondisi sebelumnya. itu berarti

dakwah pemberdayaan telah berjalan dan berhasil pada tahap persiapan hingga evaluasi. Jika kemandirian keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban telah dapat dilakukan oleh segenap pengurus dan anggota yang diberikan dakwah pemberdayaan, maka harus sudah diakhiri. Karena tahapan telah dijalankan secara sistematis dan berjalan lancar, maka pemberdayaan yang dilakukan telah berakhir. Sedangkan program peningkatan kapasitas pengendalian keuangan telah mencapai tujuannya berjalan hingga hampir satu tahun sejak awal diinisiasi dipersiapkan.

Simpulan

Pada tahap persiapan, komunitas muslim PKK menunjuk aktor pemberdayaan yang moralitas yang amanah dan kompetensi di bidang keuangannya baik yakni ketua dan wakil ketua PKK. Aktor pemberdayaan ini juga bisa ditunjuk sebagai Dai penyampai materi pengendalian keuangan. Tahap pengkajian masalah dilakukan dengan mendengar masukan keluhan persoalan dari mayoritas anggota dan pengurus PKK. Tahap perencanaan alternatif program di antaranya adalah merencanakan kegiatan dakwah pemberdayaan materinya tentang pengendalian internal isinya hak dan kewajiban pengurus serta anggota PKK menurut petunjuk Islam, penambahan pengurus baru, dan digitalisasi laporan keuangan kas dan koperasi PKK, serta di *share* ke grup komunitas. Tahap perencanaan, performalisasi rencana aksi, dan implementasi dibahas dalam musyawarah mufakat seluruh pengurus dan anggota hasilnya diterapkan semua alternatif tersebut. Tahap evaluasi bentuknya pengawasan dari Ketua dan seluruh anggota PKK, kemudian setelah bisa berjalan mandiri

ditutup dengan tahap terminasi yakni berakhirnya hubungan pemberdayaan bersamaan dengan berakhirnya periode koperasi, laporan lengkap, terbuka, bisa dipertanggungjawabkan tabungan dan SHU-nya, dan kepengurusannya berhasil mendapatkan kepercayaan kembali dari seluruh anggota komunitas muslim PKK.

Saran bagi keilmuan tahapan dakwah pemberdayaan pengendalian keuangan dan yang sejenisnya seperti dakwah anti korupsi, hendaknya bisa dikembangkan bahwa dakwah dalam makna yang lebih luas tidak hanya berupa penyampaian lisan atau penyuluhan pendekatan formal semata. Jika memang komunitas yang menjadi sasaran memiliki masalah ketidakmampuan kapasitas yang lebih kompleks. Sehingga bisa diinspirasi selain dakwah lisan penyuluhan

bisa ditambahkan dakwah dalam bentuk bilhal mendampingi mereka sampai berdaya secara mandiri, namun tetap mengedepankan pendekatan komunikasi dan bimbingan dengan adab yang baik menurut Islam. Selain itu sedikit perombakan pengurus dan kontrol untuk laporan keuangan secara rutin dan terbuka sangat diperlukan. Bagi komunitas atau organisasi muslim lainnya, meskipun kepengurusannya berbasis ibadah sosial atau sukarela, tidak perlu putus asa karena sulit memberi kesadaran pengendalian keuangan yang profesional. Sebab dalam kajian ini diberikan gambaran tahapan dakwah pemberdayaan yang terperinci dan detail tanpa meninggalkan pertimbangan kebijaksanaannya agar tidak merusak tali silaturahmi di internal komunitas Islam.

Bibliografi

- Achmad Faizal, Farid Assifa. 'Gelapkan Uang Infak Rp 266 Juta, Takmir Masjid Divonis 2,5 Tahun Penjara'. *Kompas.Com*, 18 July 2018. <https://regional.kompas.com/read/2018/07/18/18330771/gelapkan-uang-infak-rp-266-juta-takmir-masjid-divonis-25-tahun-penjara>.
- Ade Sulistiawati, Syamsuddin RS. and Encep Taufik Rahman. 'Pemberdayaan Keluarga Prasejahtera Melalui Program Keluarga Harapan'. *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 7, no. 4 (2022): 397–418. <https://doi.org/kultashttps://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/tamkin>.
- Arison Nainggolan. 'Kajian Konseptual Tentang Evaluasi Pengendalian Internal Perusahaan'. *Jurnal Manajemen* 4, no. 2 (2018): 144–52.
- Azis Muslim. 'Analisis Kegagalan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dalam Membangun Kemandirian Masyarakat Miskin (Studi Kasus Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Dan Jawa Timur)'. *Jurnal Penyuluhan* 13, no. 01 (March 2017): 79–87.
- Carl S. Waren, James M. Reeve, Philip E. Fess. *Pengantar Akutansi*. 21st ed. Buku 1. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2005.
- CIAR, Dr Dwi Joko S, S. E. , M. I. Pol , CIQnR , CIQaR, Tegor M.M S. E., and Frangky Silitonga M.Si S. Pd. *Metode Penelitian Terapan*. Deepublish, n.d.
- Cucu Nurjamilah. 'Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid Dalam Perspektif Dakwah Nabi Saw'. *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2016): 93–119. <https://doi.org/10.21580/jish.11.1375>.

- Dedeh Maryani, Ruth Roselin E. Nainggolan. *Pemberdayaan Masyarakat*. 1st ed. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019. https://www.google.co.id/books/edition/Pemberdayaan_Masyarakat/67nHDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=buku+pemberdayaan+masyarakat&printsec=frontcover.
- Dr. M. Rozali, Lc. MA. 'Tolong Menolong Demi Kebaikan Dan Kesejahteraan Masyarakat'. *Buletin Taqwa Universitas Medan Area*, Oktober 2019, Oktober 2019 edition. <https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/12514/1/M%20Rozali%20-%20Tolong%20Menolong%20Demi%20Kebaikan%20dan%20Kesejahteraan%20Masyarakat.pdf>.
- Dwihastari, Syifa, and Aufarul Marom. 'Analisis Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan Kota Semarang'. *Journal of Public Policy and Management Review* 6, no. 2 (13 March 2017): 215–25. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v6i2.15907>.
- Erdin Sumardianto. 'Perumusan Strategi Dakwah Masjid Jogokariyan Yogyakarta'. *INTELEKSIA-Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah* 3, no. 02 (2022): 243–64. <https://doi.org/10.55372/INTELEKSIAJPID.V3I2.192>.
- Erma Ariyani, Avela Dewi, Hj. Aulia. 'Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Di Wilayah Kelurahan Sungai Andai Kota Banjarmasin'. *Jurnal PubBis* 5, no. 01 (2021): 49–59. <https://doi.org/10.35722/pubbis.v5i1.370>.
- Febriyati dan Suyanto. 'Pemberdayaan Lansia Melalui Usaha Ekonomi Produktif Oleh Bina Keluarga Lansia (BKL) Mugi Waras Di Kabupaten Sleman'. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 1, no. 01 (2017): 177–92. <https://doi.org/10.14421/jpm.2017.011-10> PDF.
- Fuad Najmudin, Ai Nur Bayinah. 'Kompetensi Takmir Dalam Menjaga Kualitas Laporan Keuangan Masjid: Telaah Literatur'. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 10, no. 2 (Oktober 2022): 129–47. <https://doi.org/10.35836/jakis.v10i2.361>.
- Habibul Umam Taquiddin, Baiq Mulianahs. 'Strategi Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi Pada Santri Di Pondok Pesantren'. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2023). <http://dx.doi.org/10.17977/um019v8i1p33-41>.
- 'Hutang Dan Pentingnya Dicatat – Al-Rasikh', 29 October 2021. <https://alrasikh.uui.ac.id/2021/10/29/hutang-dan-pentingnya-dicatat/>.
- Ibu H, Ibu D, Ibu A. Permasalahan Keuangan di PKK, 20 February 2024.
- Indah Roseta, Charolin. 'Peran Enabler Agen Dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam Agraris Tradisional: Studi Kasus Desa Karanganyar, Pacitan'. *Inteleksia: Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah* 5, no. 02 (Desember 2023): 349–76. <https://doi.org/DOI:10.55372/inteleksia: jpid.v5i2>.
- Jadmika Sufiadi, Irwan Noor, dan Suryadi. 'Implementasi Program Pemberdayaan Rumah Tangga Sangat Miskin'. *REFORMASI* 5, no. 01 (2015): 160–68. <http://dx.doi.org/10.33366/rfr.v5i1.73>.
- jatimpos.co*. 'Kiai Laporkan Takmir, Pengurus Takmir Laporkan Balik Penggelapan Dana Masjid'. 4 July 2024. <https://www.jatimpos.co/hukum/14604-kiai-laporkan-takmir-pengurus-takmir-laporkan-balik-penggelapan-dana-masjid>.
- Masduki, Toni Hartono, Vera Sardila, Dony Arung Triantoro. 'Pemberdayaan Muslim Muallaf Melalui Home Industry Kerupuk Ikan Lomek Di Desa Selat Akar'. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan* 3, no. 2 (2019): 425–50. <https://doi.org/doi:10.14421/jpm.2019.032-09>.
- Mhd Safuan, Kemas Ridho Aufa. 'Adab Komunikasi Dalam Islam: Bijak Dalam Bermedia Sosial'. *Hikmah* 16, no. 2 (Desember 2022): 277–94. <https://doi.org/10.24952/hik.v16i2.6492>.

- Muhammad Alhada Fuadilah Habib. 'Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif'. *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy* 1, no. 2 (November 2021): 106–34. <https://doi.org/10.21274>.
- Nella Mirani. 'Faktor Penyebab Kegagalan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Di Desa Ella Hulu Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi Tahun 2016- 2017)'. Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 2019. <https://repository.umsida.ac.id/handle/123456789/29707?show=full>.
- Nuning Indah Pratiwi. 'Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi'. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 1, no. 2 (Agustus 2017): 202–24. <https://doi.org/10.38043/jids.v1i2.219>.
- Rakimin Al-Jawiy. 'Khutbah Jumat: Keutamaan Menutupi Aib Orang Lain'. Kolomnis. nupnline, 25 February 2022. <https://www.nu.or.id/khutbah/khutbah-jumat-keutamaan-menutupi-aib-orang-lain-aXJKx>.
- Rima Fitriani, Muhtadi. 'Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pelatihan Keterampilan Dalam Membangun Kemandirian Di Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun (YIIM) Jakarta Selatan'. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 10, no. 1 (2022): 23–30. <http://dx.doi.org/10.37064/jpm.v10i1.9883>.
- Shofyan Affandy. 'Formulasi Strategi Dakwah Berbasis Analisis SWOT: Studi Kasus Renstra Masjid Baitussalam Sidoarjo 2023'. *Inteleksia - Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah* 05, no. 01 (June 2023): 1–22. <https://doi.org/10.55372/INTELEKSIAJPID.V5I1.264>.
- Sri Ndaru Arthawati, Sri Artha Rahma Mevlanillah. 'Pengembangan Masyarakat Melalui Penerapan Pengelolaan Kampung KB Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Desa Bale Kencana Kecamatan Mancak'. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 02, no. 10 (March 2023). <http://bajangjournal.com/index.php/J-ABDI>.
- Suciati. 'Peranan Aset Komunitas Dalam Pemberdayaan Pemuda Oleh Komunitas Kampung Marketer, Karangmoncol, Purbalingga'. *Inteleksia* 3, no. 01 (July 2021): 27–52. <https://doi.org/10.55372/INTELEKSIAJPID.V3I1.137>.
- Sulaeman dan Hastina. 'Manajemen Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mempertahankan Eksistensi Sekolah Di SD IT Rabbani'. *ADAARA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 11, no. 01 (February 2021): 1–12. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v11i1.2115>.
- Suyadi, Waharjani, Sumaryati, Trisna Sukmayadi. 'Da'i Antikorupsi: Pelatihan Dakwah Kultural Pada Paguyuban Mubalig Prenggan, Yogyakarta'. *COMMUNITY EMPOWERMENT* 6, no. 7 (2021). <https://doi.org/10.31603/ce.5036>.
- Tiara Rama Dian dan Muhammad Farid Ma'ruf. 'Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Padat Karya Tunai (Studi Kasus Desa Plandaan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)'. *Publika* 7, no. 4 (2019). <https://doi.org/10.26740/publika.v7n4.p%25p>.
- Untung Rahardja, Qurotul Aini, Nur Azizah, dan Nuke Puji Lestari Santoso. 'Efektivitas Akuntansi Online Dalam Menunjang Proses Rekonsiliasi'. *NJCA (Nusantara Journal Of Computers And Its Application)* 3, no. 2 (Desember 2018): 105–12. <http://dx.doi.org/10.36564/njca.v3i2.69>.
- Wakil Ketua PKK. 'Notulensi Hasil Rapat Pengurus PKK'. Sekretaris PKK, Oktober 2023.
- Yuliana Dewi Rahmawati, Hartuti Purnaweni, Tukiman Taruna. 'Tahapan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak'. *Jurnal Ekosains* 7, no. 4 (March 2016): 83–93.

